

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman.....	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Lagrange Multiplier	53
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Data Panel Tanpa Moderasi.....	53
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Moderasi <i>kebijakan hutang</i> ..	54
Tabel 4.10 Hasil Uji F Tanpa Moderasi.....	59
Tabel 4.11 Hasil Uji F Dengan Moderasi <i>kebijakan hutang</i>	59
4.12 Hasil Uji R ² Tanpa Moderasi.....	60
4.13 Hasil Uji R ² Dengan Moderasi <i>kebijakan hutang</i>	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hutang merupakan mekanisme penting untuk mengontrol tindakan manajer dan mengurangi masalah keagenan dalam perusahaan. Hal ini bisa

mengurangi keinginan manajer untuk menggunakan free cash flow guna membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak optimal. Penggunaan hutang yang tinggi juga akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Hal ini sesuai dengan trade off theory yang mengatakan bahwa semakin tinggi hutang maka semakin tinggi beban kebangkrutan. Perusahaan yang menggunakan hutang dalam pendanaannya dan tidak mampu melunasi kembali hutang tersebut akan terancam likuiditasnya sehingga pada akhirnya akan mengancam posisi manajer. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kebijakan pendanaan secara tepat. Keputusan pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan kebijakan hutang (DER). Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang diambil perusahaan dalam melakukan pembiayaan melalui hutang.

Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan (dana) dari pihak ketiga untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan struktur modal yang dipilih perusahaan. Struktur modal adalah perimbangan antara modal asing atau utang dengan modal sendiri. Pemilik perusahaan lebih menyukai perusahaan menggunakan utang pada tingkat tertentu agar harapan pemilik perusahaan agar tercapai.

Dalam menentukan kebijakan hutang, salah satu hal yang dipertimbangkan adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai keuntungan aktivitas dan lebih dikenal oleh publik dibandingkan

dengan perusahaan yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, perusahaan semakin lebih transparan dalam mengungkapkan kinerja perusahaan kepada pihak luar, sehingga perusahaan akan semakin mendapat kepercayaan oleh kreditur. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan, pembiayaan aktiva yang didanai dengan hutang akan semakin besar.

Kebijakan hutang itu sendiri merupakan salah satu keputusan pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal . Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan dari luar perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa penggunaan hutang akan menjadi lebih aman daripada menerbitkan saham baru karena saat sebuah perusahaan berekspansi, perusahaan tersebut pasti akan membutuhkan modal dan modal yang digunakan tersebut dapat berasal dari hutang maupun ekuitas(Nandiyanto et al., 2016).

Kebijakan hutang sangat bergantung pada pertumbuhan perusahaanperusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung membutuhkan dana dari sumber eksternal yang lebih besar. Seiring meningkatnya pertumbuhan suatu perusahaan, akan mendorong pengembangan perusahaan di berbagai sektor

Masalah hutang yang berakibat pada kerugian atau pailit juga terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI seperti diberitakan media

Liputan6.com bahwa PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) yang diakuisisi oleh PT Unilever Indonesia setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan pengolahan teh ini dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang piutang dengan PT Bank ICBC Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari salah satu kreditur yakni PT Bank ICBC Indonesia terhadap Sariwangi Agricultural Estate 2 Agency, dan Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. PT Sariwangi Indonesia dituntut mengembalikan dana Hingga US\$ 20.505.166 atau setara Rp 309,6 miliar. Media Tribun News juga memberitakan salah satu perusahaan legendaris pada tahun 2017, PT Nyonya Meneer dinyatakan pailit karena terjerat hutang Hingga Rp 7,4 miliar dan memiliki masalah manajemen hingga tidak bisa mengikuti pasar (Surento, 2020).

Fenomena yang terjadi di perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa harga sahamnya menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan sulit diprediksi. Selain itu harga sahamnya juga sangat rentan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Seperti beberapa tahun lalu ketika terjadi krisis global yang membuat harga saham perusahaan industri manufaktur mengalami penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan karena meningkatnya inflasi serta tingkat suku bunga sehingga menyebabkan peningkatan kondisi rata-rata harga saham. Pada Tahun 2015 harga saham mengalami kenaikan hingga tahun 2014 sebesar 7%, yaitu 1.418,75 menjadi 2.225. Sementara pada

tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017 harga saham mengalami penurunan sebanyak 9 % atau senilai 1934 menjadi 1759.5. Pada akhir tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar 51,1% menjadi 910. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebanyak 25,24% menjadi 1.217,25 (Surento, 2020)

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang bermasalah di atas, pada dasarnya memiliki kebijakan hutang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan maka pada akhirnya terancam de-listing atau penghapusan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena adanya hutang perusahaan (Susilowati, 2019:20). Berikut ini adalah daftar perusahaan yang diindikasikan memiliki kebijakan hutang tidak sesuai sehingga sehingga dikeluarkan (de-listing) dari Bursa Efek Indonesia selama 2 tahun berturut- turut.

Tabel 1.1

No	Kode	Nama Emiten	Tanggal Pencatatan	Tanggal Delisting
1	ACES	Ace hardware Indonesia Tbk	6 november 2007	30 Des 2016
2	BRAU	Berau Coal Energy Tbk	19 Agustus 2010	6 Nov 2017
3	DAJK	Dwi Aneka Jaya Kemasindo	14 Mei 2014	18 Mei 2018
4	NAGA	PT Bank Mitraniaga Tbk.	09 Jul 2013	23 Ags 2019
5	BORN	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	26 Nov 2010	20 Jan 2020

Daftar Perusahaan Delisting dari BEI Tahun 2016 - 2020

Sumber: <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/aktivitas-pencatatan/>

Perusahaan-perusahaan mengalami delisting dari BEI dikarenakan ketidakmampuan dalam membayar hutang. Perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan karena kebijakan hutang yang diambil perusahaan tidak berhasil dan hal tersebut menjadi ancaman yang bisa dialami oleh semua perusahaan tanpa melihat jenis ataupun ukuran perusahaan serta terjadinya bisa kapan saja. Padahal tujuan kebijakan hutang adalah untuk menentukan besarnya sumber pendanaan yang berupa hutang agar perusahaan tetap stabil (Surento, 2020).

Struktur modal juga menentukan keputusan tentang kebijakan hutang yang akan diambil dalam perusahaan. Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Dalam penetapan struktur modal, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai variabel yang mempengaruhinya karena secara langsung keputusan struktur modal akan mempengaruhi kondisi dan nilai perusahaan serta menentukan kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang. Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan kepemilikan manajerial.

Struktur aktiva merupakan perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan yang dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva. Semakin tinggi struktur aktiva perusahaan

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan mendapatkan jaminan hutang jangka panjang. Perusahaan dengan struktur aktiva tinggi cenderung memilih menggunakan dana dari pihak luar atau hutang untuk mendanai kebutuhan modalnya.

Struktur aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberi manfaat dimasa yang akan datang. Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antar aktiva lancar dan aktiva tetap.

struktur aktiva adalah sebuah jaminan perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan dalam menggunakan utang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan khusus.

Struktur aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan atau dimiliki oleh suatu organisasi untuk menghasilkan nilai ekonomi atau pendapatan sekarang atau kedepannya (Adhi, H.,Alfarisi.,2019). Sebuah perusahaan pada umumnya memiliki dua jenis asset yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Struktur asset adalah berapa saldo antara asset tetap dan asset lancar adalah dialokasikan dalam penggunaannya. Struktur asset dengan symbol (TANGIBILITY) dan menggunakan skala pengukuran rasio (mohammad nugraha , 2020).

hutang ditunjuk sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan perselisihan keagenan tidak bermaksud membuat manajemen dapat meneruskan dengan hutang yang sebanyakbanyaknya. Kemunculan financial distress dan penurunan nilai

perusahaan itu disebabkan karena adanya hutang yang terlalu tinggi. Dengan terjadinya hutang yang terlalu tinggi maka manajer perusahaan harus faham serta mampu mengendalikan hutang. Melahirkan suatu kebijakan hutang dalam perusahaan sangatlah sulit karena didalam perusahaan ada banyak pihak yang berkepentingan masing-masing sehingga pada saat pemutusan membuat suatu keputusan tentu tidak akan lepas dari yang namanya perselisihan keagenan yang ada pada perusahaan (sheiservian et al., 2015).

Struktur asset adalah property atau bentuk investasi perusahaan. Bentuknya dapat berupa harta atau kekayaan atau hak milik atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan (Ramadhani et al., 2020).

Kemudian tarif pajak juga dapat menentukan keputusan tentang kebijakan hutang, menurut bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan pengurang pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak sebuah perusahaan, semakin besar manfaat yang diperoleh dari hutang. Sehingga tarif pajak dapat mempengaruhi kebijakan hutang suatu perusahaan. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase.

Tariff pajak merupakan besarnya biaya non kas yang menyebabkan penghematan pajak dan digunakan sebagai modal untuk mengurangi hutang, mengemukakan bahwa penggunaan hutang akan menimbulkan kewajiban

membayar bunga, yang dalam laporan laba rugi biaya bunga tersebut akan mengurangi keuntungan kena pajak (Romadhina, 2018).

Tarif pajak cenderung meningkatkan biaya transaksi perusahaan karena tingginya bunga bank pinjaman. Namun, non-debt tax shield tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya yang tinggi, sehingga dapat mengurangi jumlah dana yang ditempatkan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk memilih cara non-debt tax shield untuk menunda atau mengurangi pajak. Secara keseluruhan, pelindung pajak on-utang mungkin lebih disukai daripada pelindung pajak utang perisai pajak non-utang memainkan efek substitusi tertentu pada perisai pajak utang (Gao, 2016).

Pajak tidak hanya tidak berpengaruh pada kebijakan keuangan perusahaan, tetapi juga meninggalkan kriteria investasi tidak berubah. Ini tidak sama dengan membiarkan investasi tidak berubah karena efek kekayaan dari pajak dapat mempengaruhi jalan ekonomi. Hal ini dibuktikan dalam model yang dikembangkan disini, dimana bentuk potensial dimana kekayaan dapat dimiliki adalah utang dan ekuitas perusahaan, dan pemerintah (Bradford & No, 2017).

Risiko bisnis adalah adanya ketidakpastian atas proyeksi pendapatan di masa mendatang. Risiko bisnis ini berkaitan dengan ketidakpastian dalam pendapatan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan akan memiliki risiko bisnis yang rendah jika permintaan produk bersifat stabil, harga input dan produk cenderung tetap, harga dapat dengan mudah dinaikkan jika terjadi kenaikan biaya, dan persentase biaya bersifat variabel dan menurun jika produk dan penjualan mengalami penurunan.

Risiko bisnis merupakan faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang suatu perusahaan. Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan akibat kerugian dalam perusahaan. Perusahaan yang menghadapi risiko bisnis yang tinggi, akan menghindari penggunaan hutang yang tinggi dalam mendanai aktivitasnya, maka semakin tinggi risiko bisnis suatu perusahaan maka kebijakan hutang perusahaan tersebut rendah.

Risiko bisnis juga menentukan keputusan tentang kebijakan hutang yang akan diambil perusahaan. Risiko bisnis ini berhubungan dengan ketidakpastian dalam pendapatan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang menghadapi risiko bisnis yang tinggi sebagai akibat dari kegiatan operasinya, akan menghindari untuk menggunakan hutang yang tinggi dalam mendanai aktivitasnya. Hal ini perusahaan tidak akan meningkatkan risiko yang berkaitan dengan kesulitan dalam pengembalian hutangnya(Hanafifi, 2015).

Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Risiko bisnis dapat meningkat ketika perusahaan menggunakan hutang yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Risiko timbul seiring dengan munculnya beban biaya atas pinjaman yang dilakukan perusahaan. Semakin besar beban biaya yang harus ditanggung maka semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan(komarudin , 2016).

Risiko bisnis adalah volume penjualan ditahun-tahun mendatang, berdasarkan penjualan historis data pertumbuhan volume. Pertumbuhan penjualan merupakan perusahaan yang relatif penjualan stabil yang dapat memperoleh lebih

banyak pinjaman dengan lebih aman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi. Dibandingkan perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Untuk perusahaan dengan tinggi tingkat penjualan dan keuntungan, kecenderungan perusahaan – perusahaan tersebut untuk menggunakan hutang sebagai sumbernya pendanaan eksternal yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat penjualan yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin tinggi kebijakan hutang (Nurfitriana & fachrozie, 2018).

Kebijakan dividen ialah keputusan keuangan perusahaan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan sebagai dividen atau ditahan sebagai laba ditahan. kebijakan dividen kerap menyebabkan konflik antara manajer dengan pihak pemegang saham. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Apabila laba yang diperoleh dengan melakukan tax avoidance dibagikan kepada investor maka akan meningkatkan nilai perusahaan karenaharga saham suatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan konstan menunjukkan bahwa pembayaran dividen yang lebih besar cenderung akan meningkatkan nilai saham. Meningkatnya tingkat pembayaran dividen menunjukkan tingkat kesejahteraan investor yang juga mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja yang baik.

Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan apakah laba yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan.

Kebijakan deviden adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang

Pada kenyataannya, penggunaan hutang yang besar oleh perusahaan sekarang ini sulit dijumpai dan menurut trade off theory semakin tinggi hutang maka semakin tinggi beban kebangkrutan yang ditanggung perusahaan. Penambahan hutang akanmeningkatkan tingkat risiko atas arus pendapatan perusahaan. Semakin besar hutang, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tetap berupa bunga dan pokoknya. Risiko kebangkrutan akan semakin tinggi karena bunga akan meningkat lebih tinggi daripada penghematan pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus sangat hati-hati dalam menentukan kebijakan hutangnya karena peningkatan penggunaan hutang juga dapat menurunkan nilai perusahaan(Nandiyanto et al., 2016).

Kebijakan hutang dalam suatu perusahaan dilakukan oleh pihak manajer. Untuk mengontrol tindakan manajer dalam memutuskan penggunaan hutang perusahaan diperlukan pengawasan oleh pemegang saham karena mereka akan terlibat apabila perusahaan mengalami risiko gagal bayar. Salah satu pihak pemegang saham dalam perusahaan adalah pihak luar perusahaan (outsider) yang merupakan sebuah institusi. Kepemilikan saham oleh sebuah institusi atau perusahaan lain disebut kepemilikan institusional. Peningkatan aktivitas pengawasan oleh investor didukung oleh usaha untuk meningkatkan tanggungjawab manajemen.Risiko bisnis merupakan faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang suatu perusahaan.

Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan akibat kerugian dalam perusahaan. Perusahaan yang menghadapi risiko bisnis yang tinggi, akan menghindari penggunaan hutang yang tinggi dalam mendanai aktivitya, maka semakin tinggi risiko bisnis suatu perusahaan maka kebijakan hutang perusahaan tersebut rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun penelitian yang berjudul :“ **PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, TARIF PAJAK, DAN RESIKO BISNIS TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG DENGAN KEBIJAKAN DEVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020**”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.
2. Investor lebih menyukai dividen dibandingkan dengan capital gain karena dividen bersifat lebih pasti, dengan demikian pembayaran dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan.
3. Semakin besar hutang maka semakin besar risiko kebangkrutan yang akan ditanggung perusahaan sehingga akan menyebabkan nilai perusahaan menjadi turun.

4. Suatu perusahaan pasti akan membutuhkan modal yang berasal dari hutang maupun ekuitas.
5. hutang ditunjuk sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan perselisihan keagenan tidak bermaksud membuat manajemen dapat meneruskan dengan hutang yang sebanyak banyaknya.
6. Kebijakan dividen ialah keputusan keuangan perusahaan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan sebagai dividen atau ditahan sebagai laba ditahan.
7. Kebijakan hutang dalam suatu perusahaan dilakukan oleh pihak manajer.

1.3. Batasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ pengaruh struktur aktiva,tarif pajak, dan resiko bisnis terhadap kebijakn hutang dengan kebijakan deviden sebagai variabel moderasi 2016-2020

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh struktur aktiva terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang di BEI 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang di BEI 2016-2020?

3. Bagaimana pengaruh resiko bisnis terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang di BEI 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh struktur aktiva terhadap kebijakan hutang yang dimoderasi dengan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang di BEI 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan hutang yang dimoderasi dengan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang di BEI 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh resiko bisnis terhadap kebijakan hutang yang dimoderasi dengan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang di BEI 2016-2020?

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur terhadap kebijakan hutang
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan hutang
3. Untuk mengetahui pengaruh resiko bisnis terhadap kebijakan hutang
4. Untuk mengetahui pengaruh struktur terhadap kebijakan hutang yang dimoderasi dengan kebijakan dividen
5. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan hutang yang dimoderasi dengan kebijakan dividen

6. Untuk mengetahui pengaruh resiko bisnis terhadap kebijakan hutang yang dimoderasi dengan kebijakan dividen

1.6. Manfaat penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Bagi Peneliti Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tanpa melakukan penggelapan pajak.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh pemanfaatan tax haven, withholding taxes, dan ukuran komite audit terhadap praktik thin capitalization.

4. Bagi Peneliti Berikutnya